

## BAB V

### TUJUAN AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

*“...for just about all intents and purposes, not real...”*  
(Hines 1988:252)

#### 5.1 Pendahuluan

Saya tertarik oleh pernyataan dari Hines (1988) mengenai keberadaan akuntansi sebagai realitas kehidupan. Ia menyatakan bahwa sejatinya akuntansi modern telah mereduksi realitas kehidupan, mulai dari konsep hingga praktiknya. Melalui percakapan dialogis imajiner, beliau menyatakan bahwa akuntansi modern justru membentuk realitas lain dalam kehidupan dengan membuat sejumlah konsep baru yang bertentangan dengan hakikat manusia seutuhnya. Ia juga menyatakan bahwa akuntansi tidak mencapai realitas kehidupan sebenarnya karena adanya keberpihakan kepada segelintir kalangan. Pada akhirnya, realitas yang terbentuk dari akuntansi modern adalah sebuah kepalsuan kehidupan (Kamayanti, 2011).

Hal yang perlu digarisbawahi dalam pernyataan tersebut adalah tujuan dari akuntansi. Tujuan akuntansi menjadi penting untuk dibahas karena hal ini menggambarkan arah pengembangan konsep dan praktik. Akuntansi tidak dapat menjadi sebuah realitas ketika tujuannya sendiri sudah tereduksi (Bryer, 2014). Selain itu, tujuan akuntansi pada dasarnya menunjukkan keberpihakan dalam aktivitas perekonomian karena terdapat kalangan yang mendapat arah prioritas dalam hal tersebut (McKernan dan MacLulich, 2004). Bahkan, dalam perspektif lainnya, tujuan akuntansi juga mencerminkan dimensi etis dalam aktivitas perekonomian (Bayou, Reinstein dan Williams, 2011).

Kita tahu bahwa tujuan akuntansi modern (PAT dan laba) adalah memberikan dasar bagi pemilik modal dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi (lihat Bab 1). Tujuan ini kemudian berimplikasi pada adanya keberpihakan terhadap pemilik modal dan munculnya kalangan termarginalkan dalam aktivitas kehidupan (Macintosh, 2006; Lehman, 2014). Jika akuntansi ingin memiliki arah untuk menghilangkan sekat kaum termarginalkan, tujuannya harus diubah (Lee, 2013).

Pada sisi lainnya, akuntansi dan manusia sejatinya memiliki hubungan saling memengaruhi (Sitorus, 2015). Dalam hal ini, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya jika tujuan akuntansi memberikan arahan yang jauh dari realitas sesungguhnya. Selain itu, *homo pancasilaus* tidak dapat terwujud ketika tujuan akuntansi masih jauh dari koridor Pancasila. Oleh karena itu, tujuan akuntansi harus diganti untuk mewujudkan realitas seutuhnya.

Dalam memformulasikan tujuan akuntansi, saya menggunakan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut diformulasikan dalam beberapa aspek tujuan akuntansi yang saling berhubungan. Jika pada pembahasan *homo pancasilaus* saya mengaitkan lebih dari satu nilai untuk membentuk karakteristik, hal tersebut juga dilakukan untuk memformulasikan tujuan akuntansi.

## **5.2 Nilai Ketuhanan: Tujuan Akuntansi adalah Amanah**

Sebelum membicarakan tujuan akuntansi secara rinci, kita sebaiknya membedah bidang ini dalam konteks amanah. Amanah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dipercayakan oleh pihak lain untuk digunakan sebagaimana mestinya (Triyuwono, 2012). Terdapat hal penting yang perlu ditekankan dalam pengertian tersebut. Pertama, siapa sejatinya yang memberikan amanah. Identifikasi terhadap pemberi amanah menjadi penting untuk menelaah sesuatu

yang dipercayakan dan tujuan dari pemberian kepercayaan tersebut. Kedua, kepercayaan yang diberikan tentunya berimplikasi kepada berbagai pihak. Oleh karena itu, mengaitkan amanah dengan tujuan akuntansi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mengidentifikasi siapa pemberinya dan bagaimana konsekuensinya dalam realitas kehidupan, khususnya pada aspek perekonomian.

Banyak peneliti terjebak dalam kedua pertanyaan tersebut sehingga posisi akuntansi hanya dipandang sebagai alat semata (Macintosh, 2006; Triuwono, 2006; Kamayanti, 2016b). "Fungsi dari akuntansi hanyalah sebagai sebuah alat dan tidak lebih dari itu" demikian anggapan mereka yang mencoba memisahkan akuntansi dari konteks nilai dan moral, termasuk dalam hal ini adalah amanah (Hines, 1989; Rutherford, 2013; Kamayanti, 2016b). Oleh karena itu, memosisikan akuntansi dalam konteks amanah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang aneh bagi mereka.

Hal ini kemudian mengarahkan akuntansi untuk tidak sekadar berfungsi sebagai alat. Kita perlu menyadari bahwa sejatinya segala filosofi dan praktik yang melekat pada akuntansi merupakan cerminan dari amanah, termasuk dalam hal ini PAT. Hal ini secara tegas tertuang dalam pernyataan Watts dan Zimmerman (1986) yang secara tegas menekankan bahwa tujuan dari teori adalah memprediksi (*to predict*) dan menjelaskan (*to explain*) praktik akuntansi. Kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan amanah bagi para pelaku akuntansi untuk mengembangkan teori berbasis pemikiran rasional. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika terdapat serangkaian metode kuantitatif yang dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan teori dan kebijakan karena PAT telah mengamanahkan hal demikian.

Watts dan Zimmerman (1986) juga menyatakan bahwa terdapat banyak kalangan yang memerlukan teori sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, kalangan yang dimaksud terfokus pada pemilik

modal sebagai penyedia dana bagi perusahaan (Tinker, Merino dan Neimark, 1982; Ball, 2013; Tinker, Sy dan Saxe, 2016). Dalam hal ini, PAT dan laba memberikan amanah bagi para pelaku akuntansi untuk memprioritaskan pemilik modal dalam aktivitas perekonomian. Implikasinya, laporan keuangan juga harus memberikan landasan dalam melakukan pengambilan keputusan dalam kaca mata pemilik modal (IASB, 2015).

Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi mengandung amanah, bahkan dalam kaca mata PAT dan laba sekalipun. Hal ini tentu saja memberikan argumentasi bahwa akuntansi bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Meskipun demikian, kita patut menyadari kepada siapa amanah tersebut diberikan. Dalam hal ini, kita patut mempertanyakan apakah layak PAT dan laba memberikan amanah kepada pelaku akuntansi untuk membangun landasan keilmuan berbasis rasionalitas. Selain itu, kita juga patut mengkritisi mengenai langkah PAT dan laba yang memberikan amanah untuk memprioritaskan kepentingan pemilik modal. Langkah seperti ini sangat diperlukan sebagai landasan untuk menelaah sejauh mana akuntansi meletakkan landasan amanah dalam aktivitas perekonomian.

Pertama, dalam konteks pengembangan teori akuntansi berbasis rasional. Kita patut menyadari bahwa manusia tidak hanya terbatas pada pola pikir berbasis rasional semata, tetapi terdiri atas banyak unsur di dalamnya (Triyuwono, 2015c). Hal ini terjadi karena realitas kehidupan bukan hanya terbatas pada konteks materi yang notabene merupakan orientasi pola pikir rasional (Chwastiak, 2006; Soufian, Forbes dan Hudson, 2014). Terdapat berbagai macam hal yang membentuk realitas kehidupan, termasuk dalam hal ini akuntansi (Hines, 1988; Lamberton, 2015). Sikap PAT yang meletakkan landasan amanah kepada rasionalitas sesungguhnya hanya mereduksi unsur manusia dan realitas kehidupan (Hines, 1988; Kamayanti, 2009, 2016b). Dengan demikian, akuntansi dan manusia tidak dapat menjalankan amanah ketika mereduksi unsur dan realitas kehidupan. Selain

itu, pola pikir berbasis rasionalitas layak dijadikan sebagai landasan teori ketika hal ini berujung kepada keterpisahan manusia dengan realitas kehidupan.

Kedua, dalam konteks pemilik modal sebagai prioritas pengembangan akuntansi. PAT secara tegas memberikan amanah yang berpihak kepada kesejahteraan pemilik modal. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan akuntansi. Dalam hal ini, pertanyaan tersebut tertuju kepada kelayakan akuntansi dalam memberikan prioritas bagi pemilik modal saat realitas sosial sejatinya didominasi atas berbagai macam golongan masyarakat (Hines, 1988; Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016; Tinker, Sy dan Saxe, 2016). Inilah realitas pemberi amanah yang berujung kepada pengutamaan unsur materi dalam aktivitas ekonomi (Tinker, Merino dan Neimark, 1982; Friedman, 1995; Brown, Dillard dan Hopper, 2015). Segala macam metode yang diusulkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) serta kebijakan akuntansi modern pada dasarnya adalah amanah dari pemilik modal untuk menyejahterahkan dirinya (Carmona, 2013; Mulawarman, 2013a; Kusdewanti *et al.*, 2014). "*There is one and only one social responsibility in business, to use its resources engage in activities designed to increase its profit*" (Friedman, 2007) setidaknya menjadi roh di balik PAT untuk menyejahterahkan para pemilik modal.

Kedua langkah tersebut menunjukkan bahwa PAT selama ini berpihak kepada satu kalangan semata, terutama dalam konteks amanah. PAT telah mereduksi segala realitas yang ada hanya demi kepentingan pemilik modal (Hines, 1988; Macintosh, 2006). Bukan hanya itu, PAT telah mereduksi cara berpikir manusia melalui ranah rasionalitas dalam pengembangan aktivitas ekonomi (Shapiro, 1997; Bayou, Reinstein dan Williams, 2011; Soufian, Forbes dan Hudson, 2014). Inilah yang disebut amanah semu, kepercayaan yang diberikan hanya demi kebahagiaan materi (Hines, 1988).

Sebuah tulisan dari Schneider (2012) setidaknya memberikan gambaran bahwa amanah akuntansi modern yang notabene tercermin dalam PAT merupakan sebuah hantu bagi kehidupan manusia. Melalui perspektif kehidupan teater, beliau mengungkapkan bahwa kapitalisme pada dasarnya mematikan kehidupan manusia, khususnya kalangan bawah (dalam hal ini digambarkan sebagai buruh). Lebih dalam lagi, beliau mengungkapkan bahwa kapitalisme juga mematikan keberadaan Tuhan dalam kehidupan manusia. “...*the zombies are reflection machines, flexible theatres of the crowd, aimed to catch the visages of those who worship corporate wealth...*” (Schneider, 2012) merupakan ungkapan kekesalan penulis terhadap akuntansi modern yang membawa roh kapitalisme. Korporasi kini bertindak sebagai “Tuhan” dalam aktivitas kehidupan manusia melalui amanah akuntansi modern.

Bagaimana dengan posisi Pancasila? Nilai Pancasila yang menjunjung tinggi peradaban luhur tentu membawa landasan berbeda dalam pemberian amanah. Pancasila sejatinya bukan hanya sekadar nilai, tetapi juga semangat pembebasan dari penjajahan PAT (lihat bab 2). Dalam lingkup yang lebih luas, Pancasila memiliki nilai ketuhanan yang berasal dari kesadaran bangsa Indonesia terhadap keberadaan Tuhan. Kesadaran inilah yang seharusnya juga terkandung dalam amanah akuntansi untuk membentuk manusia dan peradaban yang utuh. Oleh karena itu, penggunaan Pancasila sebagai landasan amanah kepada akuntansi dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat.

Pada perspektif Pancasila sendiri, akuntansi diberikan amanah dalam bentuk Trisakti. Bukan hanya manusia yang diberikan kepercayaan untuk mewujudkan amanah Trisakti (lihat pembahasan bab 3), akuntansi juga bersifat demikian. Akuntansi juga harus mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dengan kata lain, akuntansi harus membentuk kedaulatan di tengah situasi ekonomi yang berorientasi modernitas. Akuntansi

harus menunjukkan bahwa dirinya tidak terstandardisasi oleh sistem yang berorientasi kepada kepentingan segelintir pihak semata (Müller, 2014; Picard, 2016; Tinker, Sy dan Saxe, 2016). Sebaliknya, akuntansi harus menunjukkan jati dirinya dalam membangun realitas kedaulatan (Vinnari dan Dillard, 2016).

Berbeda dengan PAT, amanah Trisakti pada dasarnya merupakan cita-cita dan kehendak rakyat Indonesia untuk berdaulat dan berketuhanan. Pancasila sejatinya bukan merupakan bawaan dari segelintir pihak, tetapi merupakan gagasan bersama dari masyarakat Indonesia (Swasono, 2013; Latif, 2014). Cita-cita inilah yang kemudian menjadikan akuntansi Pancasila sebagai bentuk kesadaran bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, amanah Trisakti sejatinya bukanlah sesuatu yang distandardisasi ataupun dipaksakan. Sebaliknya, amanah Trisakti merupakan bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam membela kebatilan (Cahyanto dan Parikesit, 2011; Cahyanto, 2012).

Konsekuensi dari amanah Trisakti dalam akuntansi pada hal orientasi tentu juga berbeda jika dibandingkan dengan PAT. Ketika PAT hanya berorientasi kepada unsur materi, akuntansi Pancasila menghendaki orientasi sebaliknya. Akuntansi berbasis Pancasila tentunya mengedepankan nilai-nilai nonmateri dalam melaksanakan amanah karena hal tersebut merupakan cara masyarakat Indonesia dalam memandang realitas kehidupan (Parikesit, 2012b; Latif, 2014). Akuntansi (dan manusia) tidak lagi menjadi hantu dalam realitas materi, tetapi mampu menyeimbangkan segala unsur yang dimiliki ketika amanah Trisakti terwujud.

Hal ini kemudian memberikan pernyataan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila sejatinya mengandung berbagai unsur yang menjadi pembentuk keutuhan manusia. Bukan hanya itu, nilai-nilai Pancasila mampu membentuk manusia berketuhanan dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai inilah yang sejatinya

dibutuhkan oleh akuntansi dalam menjalankan amanah untuk menjalankan kedaulatan.

Kunci dari terlaksananya amanah ini adalah internalisasi nilai Pancasila dalam tubuh akuntansi dan manusia itu sendiri. Hal ini tidak bisa diganggu gugat karena pada dasarnya akuntansi dan manusia merupakan unsur yang saling memengaruhi. Akuntansi membentuk manusia dan hal ini berlaku sebaliknya (Lamberton, 2015; Sitorus, 2015). Nilai baru dapat terinternalisasi jika akuntansi dan manusia saling bersinergi satu sama lain. Selain itu, internalisasi Pancasila dalam amanah akuntansi dapat dikatakan sebagai bentuk cerminan dari gagasan masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan amanah tidak dapat dilakukan apabila akuntansi dan manusia tidak saling bersinergi dalam ideologi Pancasila.

### **5.3 Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan: Tujuan Akuntansi adalah Kemanunggalan**

Kajian mengenai tujuan akuntansi kemudian mengarah kepada penyatuan segala realitas kehidupan. Bagi penganut konsep PAT ataupun laba, kemanunggalan akuntansi dianggap sebagai hal yang aneh maupun janggal (Triyuwono, 2012). Mereka melihat bahwa akuntansi merupakan bentuk teknis sehingga tidak mungkin terjadi kemanunggalan terhadap realitas kehidupan (Friedman, 1995; Boyce dan Greer, 2013; Carmona, 2013). Selain itu, mereka juga menganggap bahwa akuntansi hanyalah bentukan manusia untuk meraih materi (Tinker, Merino dan Neimark, 1982; Edgley, 2014) sehingga tidak mungkin hal ini dikaitkan dengan kemanunggalan. Akhirnya, mereka menganggap bahwa biarlah akuntansi terpenjara dalam realitas materi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Triyuwono, 2012; Kamayanti, 2016b).



Kita perlu memahami bahwa segala realitas kehidupan bukan merupakan sesuatu yang terpisah (Triyuwono, 2006; Sitorus, 2016a), bahkan dalam PAT sekalipun. Pada satu sisi, Watts dan Zimmerman (1986;1990) selaku pelopor PAT menekankan bentuk akuntansi yang berorientasi kepada materi (Tinker, Sy dan Saxe, 2016). Pada sisi lainnya, PAT menekankan bentuk manusia sebagai *homo economicus* yang kembali berorientasi kepada materi (Watts dan Zimmerman, 1986; Jensen dan Meckling, 1994; Anker, 2012). Kedua sisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi penyatuan yang erat dalam realitas kehidupan sekalipun. Meskipun demikian, penyatuan unsur tersebut masih berorientasi kepada unsur materi (Edgley, 2014).

Ketika kita menyadari bahwa akuntansi mengemban amanah untuk membentuk peradaban, kemanunggalan menjadi sebuah urgensi. Sebuah amanah tidak akan terlaksana dengan sempurna apabila tidak ada rasa saling terkait dengan segala realitas kehidupan sehingga akuntansi juga harus mengalami hal demikian. Perbedaannya, kemanunggalan akuntansi dalam perspektif Pancasila tidak berorientasi kepada materi (Sitorus, 2016a). Akuntansi Pancasila tidak bisa melakukan kemanunggalan dengan materi sebagai puncak karena hal ini tentunya melanggar *kredo* ideologi tersebut. Selain itu, konteks amanah Trisakti pada dasarnya tidak ditujukan kepada unsur materi semata (Soekarno 1960;1964) sehingga merupakan sesuatu yang ganjil jika akuntansi berpatokan kepada unsur materi.

Lantas, bagaimana realitas kemanunggalan dalam akuntansi pada perspektif Pancasila? Pertama, akuntansi harus menyatukan dirinya dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa sejatinya Tuhan adalah pusat kemanunggalan akuntansi (Triyuwono, 2012). Segala sesuatu pada hakikatnya berasal dari Tuhan dan kembali kepada-Nya (Sitorus, 2016a). Bahkan, akuntansi

harus melebur dalam semangat ketertundukan kepada Tuhan (Kusdewanti, Triyuwono dan Djamhuri, 2016).

Saya mengakui bahwa terdapat akuntansi syariah di Indonesia yang mencoba menghadirkan keberadaan Tuhan dalam realitas kehidupan. Meskipun demikian, praktik akuntansi syariah di Indonesia justru menyimpang dalam konteks kemanunggalan. Praktik akuntansi syariah di Indonesia sendiri masih berorientasi kepada laba (Triyuwono, 2012; Kamayanti dan Rahmanti, 2014) yang notabene berlandaskan kepada egoisme diri dan jauh dari nilai ketuhanan (Hines, 1988; Chiapello, 2007; Tuszynski dan Block, 2014). Dengan perkataan lain, praktik akuntansi syariah di Indonesia masih menganut basis nilai yang sama dengan PAT. Sebaliknya, akuntansi syariah yang memiliki nilai idealis tidak mendapatkan legitimasi dan justru mendapatkan “cap’ kafir dari kalangan lainnya (Kamayanti, 2016b). Hal inilah yang menjadi ironi sekaligus koreksi bagi pengembangan akuntansi berbasis nilai ketuhanan, khususnya di Indonesia. Saya berharap jangan sampai akuntansi Pancasila mengalami paradoks nilai ketuhanan dalam konsep maupun praktik.

Kedua, akuntansi harus menyatukan dirinya dengan manusia. Kemanunggalan akuntansi dengan manusia memiliki makna adanya kesesuaian arah dan tujuan kehidupan, khususnya pada aktivitas perekonomian. Dengan kata lain, jika Pancasila dijadikan sebagai landasan, kemanunggalan akuntansi dengan manusia dapat dicapai ketika mampu mengarahkan perilaku dalam bingkai amanah Trisakti (bandingkan pembahasan *homo pancasilaus*). Bukan hanya itu, akuntansi dalam pandangan Pancasila dapat dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia (Sitorus, 2015) sehingga kemanunggalan seharusnya dapat menumbuhkan semangat kebersamaan. Kemanunggalan tidak hanya berfokus terhadap akuntansi dan manusia sebagai individu semata, tetapi juga selaku masyarakat. Akuntansi sejatinya tidak hanya hidup dalam diri individu

semata, tetapi terdapat roh yang menyatu dalam kehidupan masyarakat (Hines, 1988; Ahmed, 2012; Triyuwono, 2012).

Sifat kemanunggalan akuntansi dan manusia tentunya didasarkan kepada kesadaran bahwa tidak ada realitas kehidupan yang bersifat mutlak. Pemaknaan mutlak bukan hanya ditujukan kepada beragam jenis semata, tetapi juga mengarah kepada superioritas kedudukan. Dalam hal ini, akuntansi harus mengarahkan manusia untuk menjauhkan sifat keangkuhannya dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak bisa mengutamakan keangkuhannya dalam aktivitas perekonomian karena pada dasarnya dirinya tidak mutlak terhadap realitas yang lainnya. Hal ini tentu bisa dilakukan ketika akuntansi tidak mengandung nilai keangkuhan terhadap realitas kehidupan.

Sifat PAT yang mengasumsikan manusia sebagai *homo economicus* merupakan bentuk keterpisahan akuntansi dengan manusia karena hal ini menyebabkan bidang ini hanyalah sebuah alat demi memenuhi ego dan nafsu. Bukan hanya itu, asumsi *homo economicus* menjadi bukti bahwa PAT juga memisahkan sesama manusia. Chwastiak (2013) bahkan menyatakan bahwa PAT yang mengandung keuntungan materi sebagai orientansi dapat merusak sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu memanunggalan akuntansi dan manusia harus dilakukan dengan mengubah landasan nilai dari keduanya.

Ketiga, akuntansi harus menyatukan dirinya dengan alam semesta. Akuntansi harus menyatukan dirinya dengan keberadaan alam semesta sebagai realitas tak terpisah. Kemanunggalan akuntansi dengan alam semesta tidak bisa dipandang sebelah mata karena hal ini menyangkut keadilan bangsa. Alam semesta pada dasarnya merupakan bagian dari kedaulatan manusia (Jacobs, 2005; Humphrey dan Gendron, 2015; Sitorus, 2016a), terlebih ketika hal ini dikaitkan dalam konteks akuntansi dan negara (Mulawarman, 2012a). Akuntansi memiliki peran penting untuk memosisikan kepemilikan alam semesta, terutama

pada aktivitas perekonomian. Selain itu, akuntansi juga memiliki peranan penting untuk memosisikan kedudukan alam semesta dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi. Kedudukan ini dapat dikatakan penting karena memengaruhi pola perilaku manusia dalam aktivitas perekonomian. Ketika kedudukan alam semesta terpinggirkan oleh realitas materi, kita tidak perlu heran jika banyak manusia serakah di dunia ini.

Kita juga tidak boleh melupakan aspek penting alam semesta dalam keterkaitannya dengan kesadaran berketuhanan. Alam semesta pada dasarnya merupakan anugerah dari Tuhan dalam membangun realitas kehidupan. Manusia diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memanfaatkan alam semesta demi kesejahteraan bersama. Pemaknaan “kesejahteraan bersama” tentunya tidak ditujukan kepada segelintir golongan semata. Pemaknaan ini juga tidak dapat diukur dengan menggunakan logika rasional berbasis materi.

Pada dasarnya, kemanunggalan dengan alam semesta juga harus dibuktikan dengan pengelolaan sumber daya yang didominasi oleh masyarakat Indonesia sendiri. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahkan secara jelas menyatakan bahwa segala isi alam semesta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, sebuah negara diselenggarakan demi kesejahteraan bersama dan bukan mengistimewakan golongan tertentu. Hal ini kemudian berimplikasi kepada akuntansi yang seharusnya memiliki semangat keberpihakan kepada rakyat dalam pengelolaan alam semesta (Mulawarman, 2012a). Hal inilah yang harus menjadi perhatian dalam mengonsep teori ataupun praktik akuntansi.

Realitas yang terjadi saat ini adalah pengelolaan alam semesta yang justru didominasi oleh perusahaan besar dan negara asing. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia semata, tetapi juga pada negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah (Parikesit, 2012a, 2012b; Amir dan Derifatoni, 2013). Inilah yang sejatinya menjadi paradoks dalam pengelolaan perekonomian di mana

terdapat dominasi oleh negara asing dan pemilik modal (Chwastiak dan Young, 2003; Chwastiak dan Lehman, 2008). Ironisnya, PAT justru mendukung sifat ini dengan menggerakkan standardisasi akuntan(si) dan pembukaan keran ekonomi seluas-luasnya dalam bingkai materi (Tinker, Merino dan Neimark, 1982; Herbohn dan Herbohn, 2006; Müller, 2014). Oleh karena itu, PAT tidak dapat dikatakan relevan untuk dipertahankan dalam konteks kemanunggalan alam semesta. Sebaliknya, PAT harus digusur demi terwujudnya kedaulatan alam semesta.

Saya menyadari bahwa kita tidak bisa menegasikan peran pihak lain dalam membangun realitas kehidupan. Sebuah negara memang tidak dapat berkembang tanpa adanya bantuan dari kalangan lain. Pada sisi lainnya, modal memang diperlukan dalam mengembangkan kehidupan perekonomian. Meskipun demikian, sistem perekonomian (maupun akuntansi) tidak bisa diserahkan dalam keinginan pemilik modal. Akuntansi seharusnya memiliki semangat keberpihakan kepada rakyat dan menjadikan modal (materi) sebagai penunjang (Sitorus, 2016a).

Ketiga aspek kemanunggalan tersebut menunjukkan bahwa sejatinya akuntansi bukan hanya sekadar alat. Akuntansi adalah perwujudan kesadaran manusia terhadap Tuhan sebagai unsur tertinggi. Akuntansi adalah sarana merekatkan hubungan manusia dengan sesamanya demi kemaslahatan bersama. Akuntansi adalah jembatan untuk mengangkat derajat alam semesta yang selama ini tereksplorasi. Dengan demikian, akuntansi adalah jembatan penghubung antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dalam realitas kehidupan.

Pada sisi lainnya, menanggalkan materi adalah kunci bagi akuntansi untuk manunggal dengan segala realitas yang ada. Materi pada akhirnya hanya menjadi candu ketika dijadikan patokan utama dalam realitas kehidupan (Edgley, 2014). Sebaliknya, keberadaan Tuhan, kebersamaan manusia, dan realitas alam semesta sudah seharusnya menyatu dalam diri akuntansi (Sitorus, 2016a). Ketiga

unsur ini kemudian melahirkan realitas akuntansi secara utuh dengan berlandaskan kepada ideologi Pancasila.

Saya menyadari bahwa menanggalkan materi bukanlah sesuatu yang mudah khususnya ketika pemikiran rasional masih mendominasi akuntansi. Akuntansi masih terpenjara dalam realitas materi ketika pemikiran rasional masih mendominasi. Meskipun demikian, hal ini bukanlah kemustahilan. Kita perlu komitmen bersama untuk bergerak mewujudkan hakikat akuntansi yang seutuhnya. Selain itu, kita tidak boleh hanya bergantung kepada kepentingan pemilik modal dan negara asing sehingga akuntansi terdikte sesuai dengan keinginan mereka.

#### **5.4 Nilai Persatuan: Tujuan Akuntansi adalah Meniadakan Egoisme**

Unsur ego sudah merupakan harga mati dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi berbasis PAT. Serangkaian prosedur pengujian akuntansi yang diusulkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) pada dasarnya merupakan upaya untuk memenuhi ego manusia (*self interest*) dalam mencari materi. Bukan hanya itu, konsep *homo economicus* yang menjadi ontologi PAT pada dasarnya juga mengarahkan manusia untuk bersikap egois dalam menjalani kehidupan (Boyce, 2014; Tuszynski dan Block, 2014). Para akuntan juga diarahkan untuk berperilaku etis sesuai dengan ego berbasis materi (Espinosa-pike dan Barrainkua, 2014; Miley dan Read, 2014). PAT pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bersikap egois demi mencari dan menumbuk materi selama hidupnya (Triuwono, 2006; Jensen dan Erhard, 2012). Pada akhirnya ego merupakan segalanya dalam realitas kehidupan, setidaknya dalam kaca mata PAT.

Akuntansi yang berlandaskan kepada ego pada akhirnya membentuk sistem kehidupan berbasis persaingan. Sistem seperti ini tidak hanya terbatas dalam konteks ekonomi semata (Chiapello, 2007), tetapi juga menyasar kepada

ranah sosial, bahkan agama. Positivisme yang menjadi landasan dari PAT dan laba sejatinya merupakan agama yang berlandaskan kepada ego sebagai Tuhan (Kamayanti, 2016c) meskipun pelopornya sendiri menolak untuk menyebutnya sebagai hal itu (Comte, 1896; Schneider, 2012). Agama seperti ini mengajarkan manusia untuk menonjolkan ego dalam realitas kehidupan, terutama ketika PAT dan laba sudah menghegemoni (Malsch dan Guénin-Paracini, 2013). Oleh karena itu, kita tidak perlu heran apabila banyak orang yang mengabaikan Tuhan dalam realitas kehidupan karena akuntansi sudah mengarahkan kepada hal demikian.

Jika akuntansi mengutamakan sifat ego dalam kehidupan, terdapat realitas yang tereduksi. Akuntansi yang berlandaskan kepada ego memberikan arahan untuk memprioritaskan kepentingan materi dalam realitas kehidupan (Molisa, 2011). Arah seperti ini kemudian membuat materi menjadi sesuatu yang paling diunggulkan dalam hidup sementara realitas lainnya menjadi terabaikan (Tinker, Merino dan Neimark, 1982; Hines, 1988). Selain itu, akuntansi yang berlandaskan kepada ego pada akhirnya memisahkan (bahkan menghilangkan) keterkaitan antar-realitas kehidupan (Triyuwono, 2012; Kusdewanti, Triyuwono dan Djamhuri, 2016). Bahkan, keterpisahan ini tentu membuat akuntansi memberikan sisi gelap kepada manusia dengan menonjolkan kepentingan materi (Edgley, 2014).

Kita perlu menyadari bahwa segala realitas kehidupan sejatinya saling terkait satu sama lain (lihat prinsip kemanunggalan) sehingga merupakan kelucuan apabila ego harus ditonjolkan dalam akuntansi. Manusia tentu memerlukan alam semesta dalam menjalani aktivitas kehidupan, apa pun aspeknya. Sebaliknya, alam semesta juga memerlukan peranan manusia melalui aktivitas perawatan dan kelestarian. Dalam konteks yang lebih luas, kedua unsur ini sejatinya memerlukan Tuhan sebagai unsur tertinggi dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menyatakan bahwa akuntansi berdasarkan ego sama sekali jauh dari realitas kehidupan yang sejati.

Pada perspektif norma sosial, kita perlu menyadari bahwa sejatinya masyarakat tidak boleh tunduk dalam egoisme akuntansi. Kita sebagai bagian dari masyarakat harus bisa menolak segala bentuk yang dapat merusak norma sosial mereka, termasuk dalam hal ini akuntansi (Mulawarman, 2012a). Dalam hal ini, akuntansi yang berlandaskan kepada ego harus dihilangkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, akuntansi yang berlandaskan kepada ego hanya menjadikan negara terjerumus pada ideologi persaingan. Inilah yang terjadi pada Indonesia di mana pada praktiknya akuntansi yang dianut berlandaskan kepada kapitalisme (Sitorus, 2015). Pancasila hanya sekadar retorika belaka, sedangkan ideologi kapitalisme yang menjunjung tinggi ego justru berkuasa dalam realitas negara ini (Cahyanto dan Parikesit, 2011). Selain itu, akuntansi berbasis ego justru menyebabkan ketidakberdaulatan negara karena pergeseran ideologi tersebut (Tinker, Merino dan Neimark, 1982). Pergeseran seperti inilah yang harus dihindari dalam jiwa akuntansi demi terwujudnya kedaulatan negara.

Saya menyadari bahwa akuntansi pada dasarnya memiliki sifat ego sejak dirinya ada dalam realitas kehidupan. Sifat ini tentu tidak lepas dari ego manusia yang sudah ada sejak dirinya dilahirkan di dunia ini. Meskipun demikian, realitas kehidupan ternyata tidak berkutat tentang ego kehidupan semata. Segala realitas kehidupan pada dasarnya harus saling bersinergi satu sama lain. Hal inilah yang menjadi sistem kesadaran Pancasila dalam membangun kesadaran terhadap realitas kehidupan. Pancasila secara tegas menentang adanya ego demi terwujudnya kemaslahatan bagi segala unsur kehidupan (Bakry, 2010; Swasono, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, akuntansi sejatinya harus menghilangkan sifat egois, baik pada dirinya maupun realitas kehidupan. Akuntansi harus bisa meniadakan sifat egois yang selama ini membentuk hegemoni dalam realitas



kehidupan. Jika akuntansi tidak melakukan hal demikian, segala realitas kehidupan terpisah satu sama lain. Akuntansi yang berlandaskan kepada ego juga membawa negara dalam jurang ketidakberdayaan terhadap modernitas.

Hal ini kemudian membentuk pertanyaan mengenai cara membentuk akuntansi yang jauh dari ego. Selain itu, hal tersebut juga mengarah kepada cara akuntansi agar dapat mengarahkan manusia untuk tidak bersikap egois. Beberapa peneliti telah mengonstruksi konsep akuntansi yang tidak menjadikan ego sebagai indikator utama akuntansi (Molisa, 2011; Triyuwono, 2012; Efferin, 2015; Lamberton, 2015; Sitorus, 2015). Meskipun demikian, sifat *egoless* masih menempatkan ego meskipun masih bukan prioritas pertama layaknya PAT. Bukan hanya itu, sifat *egoless* bisa menjadi berujung kepada sifat egois karena masih adanya *self oriented* dalam diri akuntansi (Kamayanti *et al.*, 2012). Hal ini tentu bertolak belakang dengan sifat ego yang diutarakan dalam penelitian ini yang hilang sama sekali karena adanya peleburan dalam diri masing-masing realitas kehidupan.

Konsep meniadakan ego pada dasarnya mengubah hakikat akuntansi dari *self interest* menjadi *soul interest*. *Soul interest* pada hakikatnya berbicara mengenai posisi realitas kehidupan yang didasarkan kepada amanah dari Tuhan (Kusdewanti, Triyuwono dan Djamhuri, 2016). Keberadaan amanah dari Tuhan membuat segala realitas kehidupan menjadi *nothing* dan meniadakan ego dalam dirinya (Kusdewanti, Triyuwono dan Djamhuri, 2016). Tanpa adanya amanah tersebut, segala realitas kehidupan tidak mungkin terbentuk. Segala realitas kehidupan pada hakikatnya merupakan amanah dari Tuhan dan kembali kepadanya. Dengan demikian, akuntansi harus meniadakan ego sama sekali karena pada dasarnya dirinya merupakan amanah dari Tuhan.

Dalam pandangan Pancasila, *soul interest* sangat jelas termuat dalam amanah Trisakti (lihat subbab sebelumnya). Amanah Trisakti sejatinya baru dapat

terlaksana ketika tidak terdapat ego dalam realitas kehidupan, khususnya akuntansi. Hal ini karena pada dasarnya amanah Trisakti tidak ditujukan kepada ego. Sebaliknya, amanah Trisakti pada dasarnya ditujukan bagi kebermaslahatan untuk seluruh realitas kehidupan dengan Tuhan sebagai puncak. Oleh karena itu, akuntansi dapat dikatakan berjiwa Pancasila ketika mampu menginternalisasi dan menjalankan amanah Trisakti dalam memiliki *soul interest* sebagai landasan.

Konsep *soul interest* memiliki implikasi bahwa akuntansi harus mengarahkan segala realitas kehidupan dalam koridor keikhlasan. Konsep keikhlasan inilah yang tidak terdapat (bahkan justru dihindari) dalam akuntansi berbasis ego. Akuntansi dapat dikatakan berorientasi keikhlasan ketika mampu menciptakan sistem yang tidak lagi berpatokan kepada materi (bahkan justru menghilangkannya) dan kepentingan pribadi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena konsep yang ada saat ini masih berorientasi kepada ego. Konsep PAT yang jelas-jelas bersandar kepada ego tentunya berharap kepada materi sebagai orientasi. Sebaliknya, akuntansi berbasis *egoless* masih mengharapkan materi secara “tersembunyi” (Kamayanti, 2012b).

Akuntansi berbasis *soul interest* dapat dicapai ketika seluruh ego dalam realitas kehidupan melebur dalam semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan tidak hanya terbatas dalam hubungan akuntansi kepada manusia semata, tetapi juga kepada seluruh realitas kehidupan. Terlebih, amanah Trisakti sejatinya tidak hanya ditujukan kepada manusia semata, tetapi juga akuntansi. Jika manusia dituntut untuk meleburkan dirinya dalam semangat kebersamaan (lihat bab 3), akuntansi harus melakukan hal demikian untuk mewujudkan amanah Trisakti. Oleh karena itu, akuntansi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan semangat kebersamaan (Sitorus, 2015) dan menciptakan unsur peleburan tersebut. Ketika akuntansi mampu melakukan hal tersebut, konsep keikhlasan dapat terwujud dengan sendirinya.

Konsep seperti ini tentu tidak lepas dari hakikat persatuan bangsa Indonesia dalam realitas kehidupan. Persatuan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia melalui Pancasila tidak sekadar semangat kebersamaan belaka, tetapi juga dilandasi oleh kesadaran terhadap Tuhan dan alam semesta sebagai bagian kehidupan mereka (Latif, 2014; Sitorus, 2015). Selain itu, konteks persatuan Indonesia sejatinya tidak hanya ditujukan kepada realitas manusia semata, tetapi juga dalam seluruh realitas kehidupan, termasuk akuntansi (Sitorus, 2016a). Hal ini merupakan tantangan sendiri bagi akuntansi (maupun masyarakat Indonesia) untuk menciptakan semangat persaudaraan di tengah hegemoni egoisme yang semakin mendominasi (Shonhadji, 2015).

Saya mengakui bahwa bukan hal yang mudah untuk membentuk akuntansi yang berjiwa *soul interest*. Namun demikian, jika *soul interest* telah merasuk dalam roh akuntansi, manusia mampu menyingkirkan egonya demi membentuk realitas kehidupan yang utuh. Bukankah merupakan hal yang indah apabila akuntansi mampu membentuk realitas kehidupan yang utuh? Bukankah merupakan hal yang indah apabila manusia mampu menyingkirkan egonya dan saling bersinergi satu sama lain? Sifat seperti inilah yang sejatinya merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara berketuhanan dan berkemanusiaan (Kaelan, 2010; Latif, 2012).

Kita tentu tahu bahwa para pendiri bangsa Indonesia membentuk negara ini dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga. Mereka bertindak tidak dengan mengutamakan ego ataupun nama baik diri dan organisasi. Sebaliknya, mereka menyingkirkan ego tersebut dan bersatu padu untuk membentuk negara yang berlandaskan kepada ideologi Pancasila. Hal seperti inilah yang sejatinya harus ada dalam jiwa akuntansi, baik dalam pengembangan konsep maupun praktiknya. Akuntansi yang tidak lagi memiliki landasan ego sudah merupakan harga mati bagi terwujudnya segala realitas kehidupan yang utuh.

## **5.5 Nilai Persatuan dan Kerakyatan: Tujuan Akuntansi adalah Memunculkan *Local Wisdom***

Kajian mengenai tujuan akuntansi juga mengarah kepada *local wisdom* mulai dari konsep hingga praktiknya. Hal ini juga merupakan urgensi karena *local wisdom* merupakan jati diri dari masyarakat. Selain itu, PAT dan laba membentuk akuntansi yang terstandarisasi demi kepentingan pemilik modal.

Seperti yang telah saya bahas sebelumnya (lihat bab 3), PAT dan laba sejatinya merupakan *local wisdom* yang dipaksakan. PAT memandang bahwa akuntansi harus menjadi bidang yang terstandarisasi untuk memudahkan pengambilan keputusan bisnis (Collin *et al.*, 2009; Oehr dan Zimmermann, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi, apapun bentuknya, merupakan *local wisdom*. Perbedaannya hanya terletak pada penerapan yang dipaksakan ataupun tidak.

Pada satu sisi, akuntansi sejatinya hanya sebuah struktur mekanis ketika mengharuskan standardisasi, baik dalam konsep maupun praktik. Akuntansi tidak lebih dari sebuah program komputer yang memuat sejumlah konsep standar (Botes, 2012). Segala hal yang tidak berasal dari standar akuntansi dipandang sebagai *outlier* diabaikan (Kusdewanti *et al.*, 2014; Kamayanti, 2016a). Pandangan seperti ini pada akhirnya turut memengaruhi manusia untuk berperilaku, khususnya dalam aktivitas perekonomian (Kamayanti, 2012a; Brown, Dillard dan Hopper, 2015). Oleh karena itu, akuntansi juga mengarahkan manusia menjadi sebuah mesin yang terkonsep dengan standar (Anker, 2012).

Pada sisi lainnya, kita harus mempertanyakan apakah nilai-nilai yang dimasukkan dalam standardisasi akuntansi sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Apabila menelusuri lebih lanjut, kita menemukan nilai-nilai akuntansi yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia, khususnya Pancasila. Pada

awalnya, PAT mengandung nilai *homo economicus* yang secara tegas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini kemudian berlanjut kepada sejumlah konsep perhitungan berbasis rasional dan materi yang pada akhirnya turut membentuk manusia menjadi pribadi egois dan individualis. Tentunya, konteks manusia semacam ini sama sekali tidak diinginkan dalam konsep *homo pancasilaus*. Implikasinya, konteks seperti ini menjadikan Pancasila berhenti dalam level konsep dan tidak menjadi kenyataan (Parikesit, 2012b).

Dalam konteks yang lebih luas, akuntansi yang terstandardisasi pada akhirnya menjadikan bangsa didikte oleh segelintir kalangan. Bukan hanya didikte, PAT sejatinya merupakan bentuk penjajahan di era modern (Macintosh, 2006; Kamayanti, 2016a). Sebuah negara dapat dikatakan berdaulat apabila memuat nilai yang bertentangan dengan ideologinya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa merupakan sesuatu yang wajar apabila terjadi jurang dalam kehidupan sosial karena akuntansinya terjajah. Bahkan, Macintosh (2006) sendiri menyebutkan bahwa akuntansi adalah kebohongan dan “*bullshit*”.

Kita harus menyadari bahwa sejatinya akuntansi harus memuat jati diri masyarakatnya, khususnya ketika dihubungkan dengan semangat kerakyatan. Akuntansi seharusnya memuat *local wisdom* karena unsur inilah yang menjadi sarana bagi rakyat untuk menggunakan hikmah dan kebijaksanaannya (Cahyanto, 2012; Sitorus dan Triyuwono, 2015). Masyarakat tidak bisa diharuskan mengikuti keinginan PAT dengan dalih meningkatkan persaingan ataupun kesejahteraan materi karena hal ini berasal dari kepentingan segelintir golongan (Cahyanto dan Parikesit, 2011; Parikesit, 2012b). Sebaliknya, pihak lain yang seharusnya mengikuti nilai Pancasila jika ingin melakukan aktivitas perekonomiannya di Indonesia. Akuntansi harus menjadi sarana bagi rakyat untuk menunjukkan kedaulatan (Sitorus, 2015) dan bukan sebaliknya.

Pertimbangan lainnya adalah ideologi Pancasila sejatinya bukanlah sesuatu yang terstandarisasi. Pancasila bukanlah nilai yang dipaksakan karena timbul dari kesadaran bersama masyarakat Indonesia (Parikesit, 2012b). Pancasila adalah cita-cita bersama bangsa Indonesia yang terinternalisasi dalam proses kehidupan (Latif, 2012). Selain itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai hasil perjuangan bersama rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan sebagai bangsa berdaulat (Latif, 2014). Hal ini tentunya berbeda dengan konteks standarisasi yang timbul karena adanya pemaksaan nilai dan berdasarkan kepentingan segelintir kalangan.

Berdasarkan uraian di atas, saya menyimpulkan bahwa *local wisdom* harus dibangkitkan dalam akuntansi. *Local wisdom* harus menjadi jati diri dalam akuntansi, baik dalam hal konsep maupun praktiknya. *Local wisdom* juga harus menjadi jati diri akuntansi untuk memunculkan Pancasila dalam diri akuntansi (Sitorus, 2016a). Bahkan, Kusdewanti et al. (2014) dengan lantang berani menyerukan untuk bersikap cuek terhadap standar global dan bergerak secara bersama-sama membentuk akuntansi berbasis *local wisdom*. Standarisasi akuntansi tidak dapat diterapkan walaupun dengan dalih persaingan global sekalipun. Hal inilah yang harus menjadi komitmen bersama dari setiap kalangan untuk mewujudkan akuntansi yang berdaulat.

Melalui *local wisdom*, akuntansi dapat menjadi pemersatu segala realitas kehidupan. Akuntansi dapat menjadi sarana persaudaraan ketika *local wisdom* dibentuk dari hasil kesepakatan bersama (Triyuwono, 2015a). Beberapa penelitian akuntansi berbasis *local wisdom* di Indonesia bahkan menunjukkan bahwa unsur ini dapat menyatukan manusia dengan alam semesta tanpa adanya pemaksaan (Cahyanto, 2012; Rizaldy, 2012; Triyuwono, 2015a; Sitorus, 2016a). Para pelaku akuntansi berbasis *local wisdom* memiliki kesadaran untuk melakukannya karena adanya keyakinan dalam hati bahwa persaudaraan dapat timbul ketika hal tersebut

dilakukan (Cahyanto, 2012; Efferin, 2015). Kesadaran seperti ini tidaklah didapat ketika akuntansi masih menonjolkan standardisasi terutama dalam hal persaingan dan materi (Malsch dan Guénin-Paracini, 2013).

Satu hal yang terpenting dalam *local wisdom* bangsa Indonesia adalah kesadaran terhadap Tuhan yang tidak berorientasi kepada diri (*spirituality to the self*). Hal ini timbul karena masyarakat Indonesia menyadari bahwa Tuhan adalah unsur tertinggi dalam kehidupannya (Nadjib, 2013; Latif, 2014). Ketika Tuhan dijadikan sebagai unsur tertinggi, manusia (bangsa) tidak akan berani mengutamakan kepentingannya, baik melalui konsep maupun praktik. Ketika hal tersebut terkandung dalam *local wisdom*, bangsa Indonesia dapat dikatakan menginternalisasi nilai ketuhanan dalam kehidupannya. Hal tersebut tentu tidak dapat kita temukan dalam paradigma akuntansi modern yang masih menjunjung tinggi materi.

Kemudian, bagaimana cara untuk mengubahnya? Mengubah *local wisdom* harus dimulai dengan mengganti paradigma akuntansi terlebih dahulu. Hal ini merupakan sesuatu yang wajib dilakukan karena paradigma merupakan akar dari segala pertimbangan akuntansi. Tanpa adanya perubahan paradigma, akuntansi masih akan berdasarkan kepada nilai-nilai modern (Kamayanti, 2013; Mulawarman dan Kamayanti, 2016). Ketika paradigma akuntansi sudah berubah, langkah selanjutnya adalah mengubah ontologi (*theory of being*) dan epistemologi (*theory of knowledge*) sebagai basis untuk membangun konsep akuntansi. Jika ketiga hal tersebut sudah berganti, aksiologi dan praktik juga dituntut untuk berubah.

Mengubah *local wisdom* juga tidak bisa dilakukan dengan memfokuskan perhatian akuntansi kepada unit usaha mikro dan organisasi nirlaba. Saya mengakui bahwa saat ini terdapat standar akuntansi yang mengatur usaha mikro dan organisasi nirlaba. Namun demikian, hal tersebut tidaklah banyak berarti

karena secara ontologi, konsep PAT masih menyertai pedoman tersebut (Sitorus, 2015). Selain itu, seperti yang telah dibahas sebelumnya, standardisasi akuntansi hanya merupakan upaya untuk menjadikan akuntansi sebagai sebuah mesin belaka. Oleh karena itu, walaupun PAT juga memiliki pedoman akuntansi selain kepada perusahaan besar. Hal tersebut tidak boleh menjadi sikap kompromi kita sebagai bangsa Indonesia.

Dalam perspektif lainnya, akuntansi yang tidak terstandardisasi seharusnya bukan menjadi masalah karena bagi Pancasila unsur materi hanyalah penunjang. Hal yang terpenting adalah bagaimana menimbulkan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan berketuhanan. Jika kedaulatan bangsa telah terpenuhi, kesejahteraan akan muncul dengan sendirinya. Jika kesejahteraan tersebut tidak muncul, Tuhan, manusia, dan alam semesta menjadi pihak yang diutamakan melalui *local wisdom*.

Indonesia sejatinya bukanlah negara yang berdiri dan hidup atas dasar modal ataupun materi lainnya. Indonesia dapat merdeka atas jerih payah masyarakatnya yang rela berkorban sampai akhir hayat. Dalam konteks yang lebih luas, Pembukaan UUD 1945 juga secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan paling utama adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, bergantung kepada akuntansi yang terstandardisasi pada dasarnya memiliki pertentangan dengan *kredo* tersebut.

Soekarno (1964), sebagai *founding father* Pancasila, menyatakan bahwa lebih baik bangsa hidup dalam kesederhanaan daripada mewah, tetapi menjadi budak. Beliau dengan tegas menyatakan hal tersebut supaya sebuah bangsa memiliki jati diri walaupun terdapat berbagai tekanan yang menyertai. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi akuntansi (dan manusia) Indonesia selama ini. Apakah selama ini kita bangga dengan akuntansi yang terstandardisasi walaupun hal ini menghilangkan jati diri bangsa? Mari kita bersama-sama bergerak



mengubah akuntansi Indonesia dengan memasukkan *local wisdom* sebagai jati diri!

### **5.6 Nilai Keadilan: Tujuan Akuntansi adalah Mewujudkan Keadilan**

Diskusi mengenai keadilan dan tujuan akuntansi merupakan hal yang menarik untuk dibahas ataupun dikritisi. Secara esensi ataupun praktik, akuntansi pada dasarnya memuat unsur keadilan dengan berdasarkan kepada nilai yang dianut. Sikap PAT yang berpatokan kepada keadilan distributif (lihat bab 1) tentunya berpatokan dari ideologi kapitalisme (McKernan dan MacLulich, 2004; Lehman, 2013). Implikasinya, PAT tentu menjadikan ego manusia dan materi sebagai indikator utama dalam mewujudkan keadilan (Lehman, 2013).

Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila tentu memiliki perspektif yang berbeda jika dibandingkan dengan keadilan distributif. Jika keadilan distributif berfokus kepada ego dan materi, keadilan sosial dalam perspektif Pancasila justru bersikap sebaliknya. Keadilan sosial Pancasila memberikan penekanan bahwa segala realitas kehidupan harus berjalan secara seimbang dengan Tuhan sebagai puncak (Sitorus, 2015). Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa sesuatu disebut adil bukan hanya diukur dari segi materi semata (Kaelan, 2010; Latif, 2012; Swasono, 2014) sehingga terdapat pertentangan dengan keadilan distributif. Implikasinya, akuntansi harus mengarahkan segala realitas kehidupan untuk berjalan secara seimbang.

Terdapat beberapa fokus yang harus menjadi penekanan utama bagi akuntansi untuk mewujudkan keadilan sosial. Pertama, akuntansi harus memiliki rasa keadilan kepada Tuhan dalam realitas kehidupan. Keadilan terhadap Tuhan dimaknai sebagai sikap menempatkan keberadaannya sebagai puncak realitas kehidupan. Penempatan tersebut memiliki konsekuensi bahwa Tuhan merupakan pusat dari realitas kehidupan, sedangkan unsur lainnya tunduk dalam otoritasnya.

Bukan hanya sekadar ritual, keadilan terhadap Tuhan terinternalisasi dalam hati manusia tanpa adanya paksaan (ikhlas). Pada masyarakat Indonesia, keadilan kepada Tuhan sangat tampak dari keberadaan sila pertama Pancasila yang secara jelas menyatakan keesaan Tuhan dalam realitas kehidupan.

Sikap PAT yang menegaskan keberadaan Tuhan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakadilan karena hal ini telah mengurangi keberadaan realitas kehidupan. Tidak hanya itu, akuntansi yang menegaskan Tuhan mengarahkan manusia untuk bersikap membangkang kepada-Nya dan mengutamakan kepentingan dirinya (Mulawarman, 2013a; Kamayanti, 2016c). Selain itu, sikap menegaskan Tuhan membuat manusia lupa terhadap jati dirinya sebagai ciptaan-Nya yang paling mulia. Manusia kemudian menjadi pribadi yang egois dan materialis karena tidak adanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, sikap seperti inilah yang pada akhirnya membawa manusia terpenjara dalam jerat keduniawian.

Keberadaan Tuhan sebagai unsur tertinggi dalam realitas kehidupan pada dasarnya merupakan hal yang tidak dapat dinegasikan. Segala realitas yang ada dalam kehidupan ini pada dasarnya merupakan ciptaan dari Tuhan. Manusia, alam semesta, bahkan akuntansi sekalipun pada dasarnya merupakan buatan Tuhan (Sitorus, 2015) sehingga sangat tidak mungkin jika keberadaan-Nya dinegasikan. Oleh karena itu, manusia pada dasarnya memiliki kodrat untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Implikasinya, akuntansi harus menjadi jembatan bagi manusia untuk selalu bergantung kepada kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan.

Pada perspektif lainnya, Tuhan telah menganugerahkan berbagai macam karunia kepada segala unsur dalam menjalani hidup. Karunia yang paling utama adalah napas kehidupan yang tidak dapat dibuat oleh realitas selain Tuhan. Oleh karena itu, kedudukan Tuhan sebagai puncak kehidupan sejatinya merupakan

hakikat keadilan itu sendiri. Dengan menempatkan Tuhan sebagai puncak utama keadilan, akuntansi secara langsung menjembatani segala realitas kehidupan untuk bersyukur atas anugerah dari Tuhan. Sebaliknya, akuntansi yang menegasikan Tuhan pada akhirnya menciptakan kesombongan manusia dan keterpisahan antarsegala realitas.

Memosisikan kepentingan ego materi jauh di atas keberadaan Tuhan pada dasarnya merupakan keanehan. Bagaimana mungkin akuntansi dapat bersikap adil sedangkan kedudukan Tuhan jauh ternegasikan? Bagaimana mungkin manusia bisa bersikap superior atas realitas kehidupan sedangkan dirinya sendiri bergantung kepada Tuhan? Bahkan, setan sendiri sejatinya percaya terhadap posisi Tuhan sebagai puncak keadilan walaupun hal tersebut tidak diinternalisasi dalam dirinya (Nadjib, 2013). Oleh karena itu, akuntansi yang menonjolkan ego dan menegasikan Tuhan dapat dikatakan sebagai *evil comedy* dalam realitas kehidupan.

Kedua, keadilan kepada manusia. Keadilan ini dimaknai sebagai menempatkan segala golongan manusia dalam hubungan yang saling harmonis (Swasono, 2014). Dengan kata lain, manusia dapat dikatakan adil terhadap sesama ketika memiliki kesadaran untuk menempatkan mereka sebagai bagian dari dirinya (Nadjib, 2013). Selain itu, keadilan terhadap sesama muncul ketika manusia menginternalisasi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam realitas kehidupan (Swasono, 2013). Hal yang juga penting dalam keadilan ini adalah keberpihakan manusia terhadap seluruh golongan untuk mewujudkan peradaban yang utuh (Soekarno 1960; 2001). Konsekuensinya bagi akuntansi adalah menjadi jembatan bagi seluruh golongan untuk menjalin semangat persaudaraan dalam realitas kehidupan.

Kita harus mengakui bahwa PAT hanya berpihak kepada kepentingan pemilik modal (Tinker, 2014). Sikap demikian tentu dapat dikatakan sebagai

bentuk ketidakadilan karena realitas kehidupan tidak hanya terbatas kepada pemilik modal semata. Pemilik modal hanyalah bagian terkecil dalam segala aktivitas kehidupan dan perekonomian meskipun kita tidak dapat memandang sebelah mata perannya. Kita tidak bisa melupakan peran kalangan lainnya yang selama ini termarginalkan dalam akuntansi modern. Kedudukan buruh, sukarelawan, bahkan tukang jamu sekalipun seharusnya setara dengan pemilik modal dalam dimensi manusia (Triyuwono, 2011), terlebih akuntansi Pancasila tidak memandang adanya strata berdasarkan jabatan ataupun kepemilikan materi (Sitorus, 2016a). Hal inilah yang tidak terpikirkan oleh PAT karena hanya berfokus pada kepentingan pemilik modal belaka (Tinker, Merino dan Neimark, 1982).

Hal yang juga tidak boleh dilupakan mengenai keadilan adalah keberadaan materi karena unsur inilah yang membentuk asumsi manusia sebagai *homo economicus*. Akuntansi yang hanya mendasarkan dirinya kepada realitas materi dapat dikatakan tidak adil karena hal ini mereduksi hakikat kehidupan manusia secara utuh. Manusia pada hakikatnya berpusat dalam roh sebagai puncak realitas kehidupan (lihat bab 3), sedangkan materi hanya sebagai bagian terluar. Ketika materi dijadikan sebagai landasan utama, manusia selalu mengutamakan ego dan menutup diri kepada roh (Kusdewanti, Triyuwono dan Djamhuri, 2016; Sitorus, 2016a). Hal ini kemudian merangsang manusia untuk bersifat serakah dan saling menjatuhkan dalam aktivitas kehidupan.

Saya menyadari bahwa materi merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Materi memang ada dalam realitas kehidupan dan manusia memerlukannya dalam aktivitas perekonomian. Meskipun demikian, kita harus kembali lagi kepada kedudukan materi yang hanya sebagai penunjang kehidupan semata (Kusdewanti, Triyuwono dan Djamhuri, 2016). Keberlangsungan kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh unsur-unsur nonmateri (Triyuwono, 2012) dan terutama terletak pada posisi roh. Oleh karena itu, akuntansi harus

mengarahkan manusia ke dalam roh pada dirinya karena pada dasarnya unsur ini yang menjadi bagian utama dari manusia.

Ketiga, keadilan kepada alam semesta. Keadilan kepada alam semesta dapat dimaknai sebagai penempatan unsur ini selayaknya keharmonisan hubungan manusia dan sesama (lihat perspektif keadilan manusia) (Latif, 2014; Swasono, 2014). Keadilan bagi alam semesta juga berarti adanya kedaulatan bagi unsur ini selayaknya manusia (“memanusiakan” alam semesta) (Bellamy dan Foster, 2013). Bagi masyarakat Indonesia, keadilan seperti ini tidak hanya dalam jiwa, tetapi juga terinternalisasi dalam kehidupan. Sejumlah upacara adat dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk “memanusiakan” alam semesta. Dalam koridor akuntansi, hal seperti ini tampak pada *local wisdom* yang dimunculkan pada konsep akuntabilitas (Rizaldy, 2012; Budiasih, 2014; Triuwono, 2015a).

PAT selama ini telah membentuk rasa ketidakadilan terhadap alam semesta. Sikap PAT yang menempatkan keuntungan materi sebagai landasan utama (lihat *triple bottom line*) pada dasarnya telah menempatkan alam semesta sebagai unsur yang termarginalkan (Ahmar dan Kamayanti, 2011; Swasono, 2013; Sitorus, 2016a). Selain itu, penempatan keuntungan materi sebagai bagian utama dalam PAT juga memancing manusia untuk bersikap serakah terhadap keberlangsungan alam semesta. Manusia memang diarahkan untuk peduli terhadap keberlangsungan alam semesta, tetapi hal ini sejatinya ditujukan untuk meraih keuntungan materi pada masa mendatang ataupun meningkatkan citra dirinya (Ahmar dan Kamayanti, 2011; Petrenko *et al.*, 2015; Sitorus, 2016a). Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa alam semesta selama ini tereksplorasi oleh pandangan akuntansi yang memisahkannya dalam realitas kehidupan.

Berbagai bencana alam yang terjadi dewasa ini dapat menjadi bukti bahwa akuntansi selama ini bersikap tidak adil kepada alam semesta. Banjir, tanah longsor, pemanasan global, dan berbagai bencana alam yang terjadi selama ini pada dasarnya merupakan akibat dari keserakahan yang diarahkan oleh akuntansi (Sitorus, 2016a). Memang, pada satu sisi manusia merupakan aktor yang melakukan kerusakan alam semesta sehingga mengakibatkan terjadinya bencana tersebut. Meskipun demikian, PAT turut berperan dalam timbulnya bencana tersebut dengan membentuk pribadi manusia berdasarkan karakteristik egois dan materialis (Ahmar dan Kamayanti, 2011; Lamberton, 2015). Konsekuensinya, struktur alam semesta menjadi tidak seimbang dan mengalami kekacauan sehingga timbul berbagai bencana dalam kehidupan (Djajadiningrat, Hendriani dan Famiola, 2011; Bellamy dan Foster, 2013).

Kita harus menyadari bahwa alam semesta telah membantu manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan, khususnya pada aspek perekonomian. Secara fisik, alam semesta telah memberikan berbagai macam faktor produksi yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitas perekonomian. Secara nonfisik, alam semesta menjadi jembatan bagi manusia untuk menyatukan dirinya kepada Tuhan (lihat aspek kemanunggalan). Pertolongan tersebut seharusnya membuat akuntansi mengarahkan manusia untuk menjaga keberlangsungan alam semesta.

Ketiga aspek keadilan tersebut menjadikan akuntansi tidak hanya sebatas melingkupi akuntabilitas materi semata. Akuntansi Pancasila pada akhirnya tidak sekadar berbicara mengenai aspek keadilan duniawi, tetapi juga terdapat dimensi ketruhidan sebagai bekal bagi manusia ketika menghadap Sang Khalik (Sitorus, 2015). Selain itu, akuntansi Pancasila juga menjadi jembatan bagi terciptanya keadilan berbasis kesadaran vertikal (hubungan manusia dan Tuhan) ataupun horizontal (hubungan manusia dan sesama serta alam semesta). Hal inilah

sejatinya yang tidak terdapat dalam PAT ataupun bentuk akuntansi lain yang menempatkan materi sebagai indikator. Saya percaya apabila akuntansi Pancasila dapat terinternalisasi oleh seluruh rakyat Indonesia, maka keadilan dan kesejahteraan yang selama ini dicita-citakan akan terwujud dengan sendirinya.

Akhirnya, kita mendapati bahwa tujuan akuntansi dalam perspektif Pancasila adalah mewujudkan keadilan. Tujuan akuntansi dalam konteks keadilan merupakan ujung dari beberapa tujuan yang disampaikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan konteks keadilan yang sejatinya merupakan aksiologi dari keempat nilai Pancasila.

## 5.7 Kesimpulan

Bab ini pada dasarnya mengonstruksi tujuan akuntansi dalam pandangan Pancasila. Tujuan PAT dan laba secara esensi ataupun praktik bertentangan dengan pandangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selain itu, tujuan akuntansi dalam pandangan PAT dan laba hanya menimbulkan keberpihakan kepada segelintir kalangan semata. Pada sisi lainnya, tujuan akuntansi Pancasila juga digunakan untuk mencetak *homo pancasilaus* dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Awal dari tujuan akuntansi Pancasila adalah memberikan kesadaran bahwa segala realitas kehidupan adalah amanah dari Tuhan. Selanjutnya, akuntansi harus menjadi jembatan bagi segala realitas kehidupan untuk menyatu dengan posisi Tuhan sebagai puncak kemanunggalan. Aspek amanah dan kemanunggalan akuntansi berimplikasi terhadap lunturnya sifat egoisme yang selama ini melekat pada diri PAT. Akuntansi juga harus bernapaskan kepada *local wisdom* sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pada akhirnya, tujuan akuntansi Pancasila adalah menciptakan keadilan bagi Tuhan, manusia, dan alam semesta.

Pada sisi lainnya, bab ini juga menunjukkan bahwa tujuan akuntansi tidak hanya terbatas kepada pengambilan keputusan bagi perolehan keuntungan materi. Tujuan akuntansi dalam perspektif Pancasila pada akhirnya mengarahkan manusia kepada unsur-unsur nonmateri dengan menggunakan hikmat dan kebijaksanaan pada segala aktivitas kehidupan, khususnya ekonomi. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan akuntansi pada PAT dan laba yang hanya mengarahkan manusia kepada penggunaan rasionalitas berbasis materi.

Akhirnya, kita patut menyadari bahwa tujuan akuntansi Pancasila bukan hanya sebagai simbol belaka. Selain membentuk *homo pancasilaus*, tujuan akuntansi Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk alternatif laba. Kita tahu bahwa selama ini laba identik dengan materi. Ketika tujuan akuntansi telah terbentuk, bagaimana alternatif laba berdasarkan perspektif Pancasila? Pertanyaan ini akan dijawab pada Bab 6.